



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BACHRIL BAKRI

Jabatan : Pj. BUPATI BOGOR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

BACHRIL BAKRI

Pihak Pertama,

Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan anak dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90.98
2	Meningkatnya Kepesertaan Pasangan Usia Subur Untuk Ber-KB	Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB/Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	61.84
3	Meningkatnya peran perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	59.45
4	Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ber-KB	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	10.57
5	Meningkatnya pelayanan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Poin	86.24

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 817.850.754	APBD
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 443.478.984	APBD
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 319.128.709	APBD
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 136.822.334	APBD
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 288.527.184	APBD
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 1.509.534.069	APBD
7.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 280.180.252	APBD

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 3.883.075.255	APBD
9.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.254.924.654	APBD
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 16.137.106.539	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

Pj. BUPATI BOGOR



BACHRIL BAKRI

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. ASEP FAHRUDIN, M.M
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

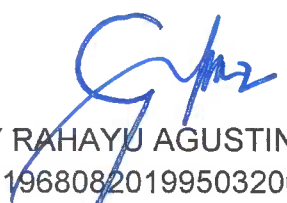
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002


Drs. ASEP FAHRUDIN, M.M
NIP. 196705281992031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

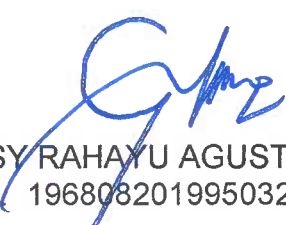
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Predikat	BB
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas	%	100.00
3	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan PD	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	98.00
4	Terpenuhinya Layanan Kepegawaian	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	90.00
5	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	80.00
6	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	80.00
7	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90.00
8	Berfungsinya Barang Milik Daerah dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	%	70.00

No.	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 386.041.918	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 11.923.955.376	APBD

No.	Kegiatan	Anggaran	Sumer Dana
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 52.048.984	APBD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 526.764.909	APBD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 635.436.785	APBD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 903.494.180	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.394.306.184	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA


Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002

SEKRETARIS DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA


Drs. ASEP FAHRUDIN, M.M
NIP. 196705281992031007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. RUSMAN TAUFIK, M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

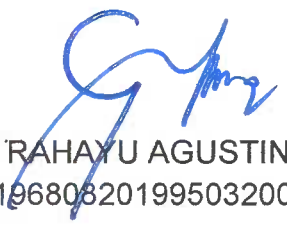
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T.
NIP. 196808201995032002


Drs. RUSMAN TAUFIK, M.Si
NIP. 196712131993121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pt. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender pada Belanja APBD	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) pada Belanja APBD	%	35.50
2	Menurunnya Jumlah Perempuan yang Mengalami Tindak Kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	2.08
3	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender	Tingkat Pemenuhan Ekonomi Keluarga yang Dikontribusi oleh Perempuan	%	4.01
4	Meningkatnya Kualitas Perangkat Daerah tentang Standar Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Memahami tentang Pelembagaan PUG	%	100.00
5	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	%	100.00
6	Meningkatnya Peserta Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Bogor	%	88.89
7	Meningkatnya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Penanganan dengan Instansi Terkait	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100.00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
8	Tercapainya Jumlah Peserta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Persentase Relawan PPA yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%	68.75
9	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak	Persentase Keluarga yang dapat Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak	%	0.0020
10	Terwujudnya Kesenjangan Gender dan Hak Anak Melalui Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga yang ada di Wilayah Kabupaten Bogor	Persentase Lembaga yang Berkerjasama pada Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ada di Wilayah Kabupaten Bogor yang terbina	%	0.0026
11	Terwujudnya Kualitas Keluarga dan Hak Anak melalui Penyediaan Layanan bagi Keluarga yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten Bogor	Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100.00

No.	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 109.987.306	APBD
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 707.863.448	APBD

No.	Kegiatan	Anggaran	Sumer Dana
3.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.282.000	APBD
4.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 35.447.984	APBD
5.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 58.520.000	APBD
6.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 186.589.234	APBD
7.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 87.024.900	APBD
8.	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 45.514.575	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002

Plt. KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Drs. RUSMAN TAUFIK, M.Si
NIP. 196712131993121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IRNA YULISTINA, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002


IRNA YULISTINA, S.Sos, M.Si
NIP. 197007151991012002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Data Gender dan Anak oleh Pemangku Kepentingan	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak	%	68.29
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Nindya
3	Meningkatnya Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang Ditangani	%	100.00
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Persentase Kualitas Data Gender dan Anak yang ada dalam Kelembagaan Data di Kabupaten Bogor	%	100.00
5	Meningkatnya Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha di Kabupaten Bogor	Persentase Penguatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha di Kabupaten Bogor	%	100.00
6	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak di Kabupaten Bogor	Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan di Kabupaten Bogor	%	100.00
7	Meningkatnya Kerja Sama Lembaga / PD dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Persentase Lembaga/SKPD yang mengikuti Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	%	100.00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
8	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Penguatan dan Pengembang Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten	%	100.00

No.	Kegiatan	Anggaran	Sumer Dana
1.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 136.822.334	APBD
2.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 106.973.509	APBD
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 181.553.675	APBD
4.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 85.121.519	APBD
5.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 980.070.600	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002

KEPALA BIDANG
PEMENUHAN HAK DAN
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

IRNA YULISTINA, S.Sos, M.Si
NIP. 197007151991012002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. RUSMAN TAUFIK, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
SEJAHTERA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

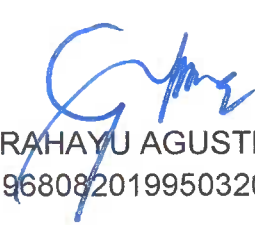
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002


Drs. RUSMAN TAUFIK, M.Si
NIP. 196712131993121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
KABUPATEN BOGOR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Sinergi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kebijakan yang Disinergikan	%	66.67
2	Meningkatnya kepesertaan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) Anggota Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga yang ber-KB	%	77.73
3	Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengendalian Kuantitas Penduduk	%	100.00
4	Tersedianya Cangkupan Data Program Bangga Kencana	Persentase Data Program Bangga Kencana yang Tersedia	%	100.00
5	Terbinanya Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%	100.00
6	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Terbina	%	100.00

No.	Kegiatan	Anggaran	Sumer Dana
1.	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp. 24.980.000	APBD
2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 255.200.252	APBD
3.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 1.226.947.954	APBD
4.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 27.976.700	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA SEJAHTERA


Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002


Drs. RUSMAN TAUFIK, M.Si
NIP. 196712131993121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LINA YULIANA, S. Sos, M.M
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

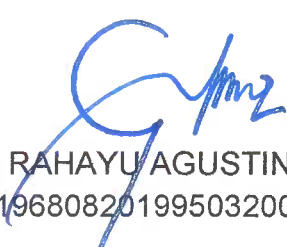
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

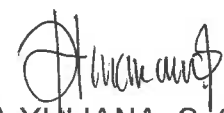
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002


LINA YULIANA, S. Sos, M.M
NIP. 197606201998032006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9.70
2	Meningkatnya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	%	100.00
3	Tersedianya Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100.00
4	Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	%	100.00
5	Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	100.00

No.	Kegiatan	Anggaran	Sumer Dana
1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp. 318.117.100	APBD
2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp. 3.231.814.846	APBD
3.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 243.257.000	APBD
4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp. 89.886.309	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

KEPALA BIDANG
PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002

LINA YULIANA, S. Sos, M.M
NIP. 197606201998032006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURHAYATI, SE
Jabatan : Plt. KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
WILAYAH TENGAH - DP3AP2KB
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

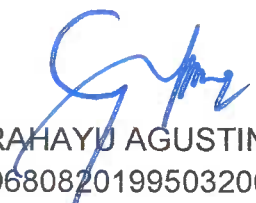
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002


NURHAYATI, SE
NIP. 198402062011012002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pit. KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
WILAYAH TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Penanganan dengan Instansi Terkait	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi di Kabupaten Bogor	%	100.00
2	Tersedianya Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus yang Memerlukan Koordinasi	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100.00
3	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	80.00
4	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90.00
5	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	73
6	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	8

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
7	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	60
8	Terlaksananya Layanan AMPK yang Terintegrasi dan Komprehensif	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	Orang	8
9	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6
10	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2
11	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
12	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12

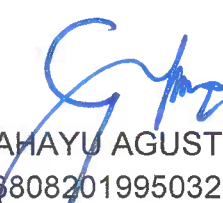
No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sumer Dana
1.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 150.815.000	APBD
2.	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp. 150.815.000	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 14.192.400	APBD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 62.314.568	APBD

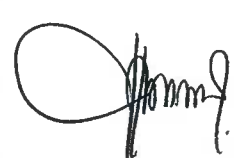
No.	Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Sumber Dana
5.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	148.340.000	APBD
6.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	2.475.000	APBD
7.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	148.340.000	APBD
8.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp.	2.475.000	APBD
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	10.748.100	APBD
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	3444.300	APBD
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	13.259.000	APBD
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	49.055.568	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Plt. KEPALA UPT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
WILAYAH TENGAH


Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002


NURHAYATI, SE
NIP. 198402062011012002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD KARTIWA DARIZKI, S.IP, M.IP
Jabatan : Plt. KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
WILAYAH TIMUR - DP3AP2KB
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

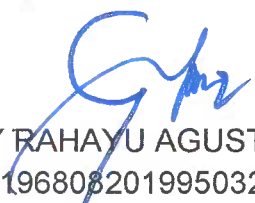
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002


ACHMAD KARTIWA DARIZKI, S.IP, M.IP
NIP. 197404182007011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pit. KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
WILAYAH TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Penanganan dengan Instansi Terkait	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi di Kabupaten Bogor	%	100.00
2	Tersedianya Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus yang Memerlukan Koordinasi	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100.00
3	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	80.00
4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Sesuai Dengan Ketentuan	%	80.00
5	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90.00
6	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	30

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
7	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	8
8	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	60
9	Terlaksananya Layanan AMPK yang Terintegrasi dan Komprehensif	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	Orang	8
10	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6
11	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2
12	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
13	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
14	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Sumber Dana
1.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	94.720.000	APBD
2.	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp.	94.720.000	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	5.054.800	APBD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	25.000.000	APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	58.055.568	APBD
6.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	92.245.000	APBD
7.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	2.475.000	APBD
8.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	92.245.000	APBD
9.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp.	2.475.000	APBD
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	3.172.750	APBD
11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	1.882.050	APBD
12.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	25.000.000	APBD
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	9.000.000	APBD

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sumer Dana
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 49.055.568	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Plt. KEPALA UPT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
WILAYAH TIMUR



Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002



ACHMAD KARTIWA DARIZKI, S.IP, M.IP
NIP. 197404182007011002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANRIYANTI, S.KOM, M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
WILAYAH BARAT - DP3AP2KB
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka 'mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002


ANRIYANTI, S.KOM, M.Si
NIP. 198001132009012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Plt. KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
WILAYAH BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOGOR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Penanganan dengan Instansi Terkait	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi di Kabupaten Bogor	%	100.00
2	Tersedianya Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus yang Memerlukan Koordinasi	Persentase Korban Kekerasan Anak yang Terlayani	%	100.00
3	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%	80.00
4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Sesuai Dengan Ketentuan	%	80.00
5	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90.00
6	Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	%	70.00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
7	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	30
8	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	1
9	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	128
10	Terlaksananya Layanan AMPK yang Terintegrasi dan Komprehensif	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan	Orang	30
11	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6
12	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
13	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2
14	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
15	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12
16	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
17	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
18	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
19	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
20	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1
21	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3

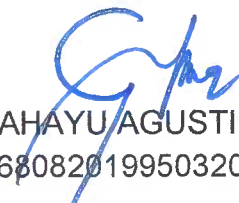
No.	Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Sumer Dana
1.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	98.694.000	APBD
2.	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp.	198.806.950	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	29.189.899	APBD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	50.000.000	APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	60.580.968	APBD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	10.670.000	APBD
7.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	81.180.000	APBD
8.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	17.514.000	APBD
9.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	178.498.950	APBD
10.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Rp.	20.308.000	APBD
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	3.792.707	APBD
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.	1.575.349	APBD
13.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	892.233	APBD
14.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	2.217.610	APBD

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Sumer Dana
15.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 1.452.000	APBD
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 19.260.000	APBD
17.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 50.000.000	APBD
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 11.525.400	APBD
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 49.055.568	APBD
20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 8.640.000	APBD
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 2.030.000	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Plt. KEPALA UPT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
WILAYAH BARAT


Ir. SUSSY RAHAYU AGUSTINI, M.T
NIP. 196808201995032002



ANRIYANTI, S.KOM, M.Si
NIP. 198001132009012001